

POTENSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA

Kristiana Sri Utami

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Agung Dwi Aryanto

Staf Bag. Perekonomian Pengembangan PAD & Kerjasama Kota Yogyakarta (Sub. Bag. Pengembangan Pajak & Retribusi)

ABSTRACT

Increasing acceptance of retribution region will impact on increasing revenue so that the ability of local governments to implement local development is also getting better and getting better welfare. Contribution retribution market to retribution region during the time period 2007 - 2011 showed a rising trend for the contribution retribution market to the PAD as a whole showed a tendency to fluctuate and the enactment of the Regional Regulation No. 3 of 2009 on Market Service Retribution, the acceptance of retribution from the year 2009 to in 2011 experienced a significant improvement almost doubled. Growth in revenue realization retribution region and retribution market in Yogyakarta showed positive growth from year to year, it is due to the adjustment of the market retribution rates, provision and improvement of facilities for the public service market. There is still much potential of each market that is not managed optimally so that needed better governance, transparent and forward looking in the era of globalization.

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah dituntut untuk mencari sumber dana secara mandiri dengan cara menggali potensi daerah yang dimiliki. Besarnya potensi yang dimiliki merupakan salah satu sumber PAD yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan biaya pembangunan daerah, walaupun ada dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan (i) pajak daerah (ii) retribusi daerah (iii)

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain – lain PAD yang sah.

Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995 : 20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi “derajat kemandirian“ keuangan suatu pemerintah daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah, seperti terlihat pada tabel 1 memperlihatkan besarnya salah satu jenis penerimaan daerah yaitu retribusi pasar dan besarnya retribusi daerah di Kota Yogyakarta :

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah
di Kota Yogyakarta, 2007 – 2011

Th Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	P A D (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)
2007	5.209.508.842	29.197.466.013	114.098.350.942	615.648.852.480,31
2008	5.740.737.026	34.940.602.210	132.431.571.514	720.860.138.474,72
2009	7.977.622.284	23.052.109.629	158.140.146.730	749.989.016.366,95
2010	13.006.982.66 3	32.214.650.779	179.423.640.058	815.495.924.651,51
2011	14.157.620.65 9	34.396.843.184	231.036.508.990	951.681.432.622,59

Sumber : DPDPK dan Bagian P3ADK Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Rekapitulasi Realisasi Penerimaan PAD, 2012.

Berdasarkan tabel 1 retribusi pasar sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan andalan dan merupakan primadona penerimaan di sektor retribusi daerah.

Retribusi pasar dan keberadaan pasar tradisional secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari sisi potensi retribusi pasar terhadap PAD, hal ini setidaknya dilandasi oleh dua hal, yaitu (i) berdasarkan data yang ada pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, selama 5 tahun terakhir penerimaan retribusi pasar selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan selama ini masih berada di bawah potensi penerimaan retribusi pasar. Dengan demikian masih adanya peluang dan kesempatan untuk ditingkatkan penerimaan retribusi pasar di masa yang akan datang; dan (ii) di

Kota Yogyakarta belum pernah diadakan penelitian secara mendalam tentang potensi retribusi pasar terhadap PAD. Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kota Yogyakarta dalam meningkatkan PAD.

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kota Yogyakarta selama tahun anggaran 2007 – 2011?
2. Berapa tingkat pertumbuhan retribusi pasar dan retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta selama tahun anggaran 2007 – 2011?
3. Berapa potensi penerimaan retribusi pasar untuk lima tahun ke depan di Kota Yogyakarta?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sumber-sumber PAD terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu: hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah.
- b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Lain-lain PAD yang sah.

Dari sejumlah pendapatan daerah tersebut di atas, upaya penghimpunan yang paling diutamakan adalah pada PAD, mengingat PAD adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah pajak daerah.

Ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah beserta potensinya diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mendorong efisiensi, maka Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memberikan suatu penyederhanaan atas banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah di masa yang lalu yang cenderung mengakibatkan timbulnya biaya ekonomi tinggi.

2. Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Secara singkat dapat disimpulkan ciri mendasar dari retribusi:

- a. Iuran yang dipungut pemerintah;
- b. Ada balas jasa secara langsung;
- c. Ada unsur paksaan;
- d. Ada unsur ekonomis;
- e. Dapat dikenakan pada orang atau badan hukum.

Adapun jenis-jenis retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu :

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pasar. Retribusi pasar dipungut kepada orang atau badan yang mendapatkan jasa layanan berupa fasilitas pasar. Pungutan retribusi pasar dilakukan oleh para petugas pemungut, yang dipimpin oleh seorang lurah/kepala pasar. Dengan demikian pungutan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh layanan jasa yang diberikan pemerintah/daerah pada masyarakat. Berbeda dengan pajak daerah, dilihat dari sudut lapangnya maka retribusi daerah masih terbuka lebar pengembangannya melalui peningkatan pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan betul-betul nyata. Widayat (1994 : 32) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi

yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.

3. Pengertian Retribusi Pasar

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang disempurnakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksudkan dengan retribusi pasar adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola Badan Usaha Milik Negera, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta. Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum yang tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan kelas pasar, jenis tempat, luas kios, luas los, tempat dasaran/plataran dan waktu.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta yaitu data pada Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, dan Bagian Perekonomian Pengembangan PAD dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dengan periode

- data penelitian tahun 2007 - 2011.
2. Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa data daerah yang diperoleh dari penelitian empiris sebelumnya maupun berdasarkan laporan yang diberikan dari instansi terkait diantaranya Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Statistik Ekonomi dan sebagainya.
 3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah seperti Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Yogyakarta, dan Bagian Perekonomian Pengembangan PAD dan Kerjasama (P3ADK) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
 4. Alat analisis

Alat analisis yang digunakan adalah pertumbuhan, kontribusi/share dan potensi, yaitu sebagai berikut:

 - a. Kontribusi/Share

Untuk menghitung kontribusi/share retribusi pasar terhadap PAD dapat digunakan analisis proporsi yaitu dengan membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan retribusi pasar dengan pencapaian atau realisasi PAD kemudian dikalikan dengan seratus persen (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000;17)
 - b. Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar
 - c. Potensi Pendapatan Retribusi Pasar
 - Potensi Pendapatan Retribusi Kios/Los dan Pedagang Pasar
 - Potensi Pendapatan Parkir
 - Potensi Retribusi Km/Wc
 - Proyeksi Potensi Pendapatan Retribusi
 - Analisis Trend

Salah satu asumsi yang umum digunakan dalam metode ini, adalah bahwa tingkat pertumbuhan periode selanjutnya sama dengan pola pertumbuhan pada periode sebelumnya dan menggunakan analisa data historis (minimal 3 tahun yang lalu). Kelemahan utama metode ini adalah tidak pernah memprediksi perubahan lingkungan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi selama waktu yang diprediksikan tersebut. Hal ini akan mungkin berdampak pada munculnya overestimate atau underestimate.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Retribusi pasar di Kota Yogyakarta merupakan salah satu komponen retribusi daerah golongan jasa umum yang memberikan peranan atau

kontribusi yang cukup berarti/besar terhadap retribusi daerah dibandingkan dengan jenis retribusi daerah yang lain seperti retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan biaya cetak KTP dan akta catatan sipil serta retribusi pelayanan jasa umum lainnya, Selama 5 (lima) tahun kontribusi retribusi pelayanan pasar terlihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah
Di Kota Yogyakarta, 2007 -2011

No	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1.	2007	5.209.508.842	29.197.466.013	17,84
2.	2008	5.740.737.026	34.940.602.210	16,42
3.	2009	7.977.622.284	23.052.109.629	34,60
4.	2010	13.006.982.663	32.214.650.779	40,37
5.	2011	14.157.620.659	34.396.843.184	41,15
	Rata-rata			30,08

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, Laporan Penerimaan Retribusi Pasar, 2012

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa peranan atau kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah adalah cukup berarti yaitu selama periode waktu 2007 – 2011 rata-rata per tahun sebesar 30,08 persen, ini berarti bahwa penerimaan retribusi pasar selama periode waktu tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat walaupun mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 1,41 persen dari tahun

sebelumnya yaitu 17,84 persen menjadi 16,42 persen kemudian mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan hampir dua kali lipat.

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD selama kurun waktu lima tahun anggaran yaitu periode 2007 - 2011 adalah seperti pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3.
Peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD
Di Kota Yogyakarta, 2007 –2011

No	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1.	2007	5.209.508.842	114.098.350.942	4,57
2.	2008	5.740.737.026	132.431.571.514	4,33
3.	2009	7.977.622.284	158.140.146.730	5,04
4.	2010	13.006.982.663	179.423.640.058	7,25
5.	2011	14.157.620.659	231.036.508.990	6,13
	Rata-rata			5,46

Sumber : DPDPK Kota Yogyakarta Laporan Penerimaan Retribusi Pasar, 2012, beberapa terbitan.

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi atau share retribusi pasar terhadap PAD selama periode tahun 2007 – 2011 menunjukkan adanya kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun.

2. Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah dan retribusi pasar

Pertumbuhan realisasi penerimaan dan tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan retribusi pasar di Kota Yogyakarta selama tahun anggaran 2007 - 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan penerimaan Retribusi Daerah

Tabel 4
Perkembangan Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan
Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta, 2007 –2011

No	Tahun Anggaran	Retribusi Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2007	29.197.466.013	-
2.	2008	34.940.602.210	19,67
3.	2009	23.052.109.629	-34,02
4.	2010	32.214.650.779	39,75
5.	2011	34.396.843.184	6,77
	Rata – rata		8,04

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi daerah per tahun selama 5 tahun anggaran

mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata 8,04 persen. Secara nominal perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah

menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari Rp 29.197.466.013 pada tahun anggaran 2007 menjadi Rp 34.940.602.210 pada tahun 2008. Tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan realisasi penerimaan retribusi daerah karena retribusi pelayanan

kesehatan RSUD tidak masuk lagi pada golongan retribusi jasa usaha tetapi masuk pada pos lain-lain PAD yang sah dan RSUD menjadi BLUD.

- b. Perkembangan penerimaan Retribusi Pasar

Tabel 5
Perkembangan Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasardi Kota Yogyakarta, 2007 – 2011

No	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2007	5.209.508.842	-
2.	2008	5.740.737.026	10,20
3.	2009	7.977.622.284	38,97
4.	2010	13.006.982.663	63,04
5.	2011	14.157.620.659	8.85
	Rata-rata		30,26

Sumber : data diolah

Perkembangan realisasi penerimaan retribusi pasar selama kurun waktu tahun anggaran 2007 -2011 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun dan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 30,26 persen per tahun.

Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 63,04 persen, hal tersebut dikarenakan diberlakukannya perda retribusi pasar yang baru pada tahun 2010 sehingga penerimaan retribusi pasar hampir 2 kali lipat.

3. Potensi penerimaan retribusi pasar

Untuk meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar di Kota Yogyakarta tahun 2012, ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Tarif retribusi pasar yaitu sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- b. Jumlah pasar atau sarana fisik, di Kota Yogyakarta berjumlah 32 buah, masing-masing pasar tersebut mempunyai jumlah wilayah kerja, jumlah fasilitas berupa kios, los, dan lapak.
- c. Jasa pasar yang disediakan berupa fasilitas pasar untuk pelayanan publik untuk berjualan terdiri dari kios, los, lapak, adanya lahan parkir, tersedianya KM/WC dan tersedianya petugas keamanan serta tersedianya bak sampah.

- d. Jumlah Pedagang, untuk jenis layanan yang masing-masing pasar dan disediakan.

Tabel 6
Keluasan Pasar

No	Nama Pasar	Luas Tanah	Luas Lantai Dasar	Luas Bangunan	Lantai
1	Beringharjo	25.000,00	18.443,00	55.443,00	3
2	Pathuk	2.412,00	2.083,00	2.083,00	1
3	Kranggan	6.107,00	6.097,00	6.673,00	2
4	Pingit	3.155,00	2.864,00	2.864,00	1
5	Kembang	1.306,00	1.086,00	1.086,00	1
6	Karangwaru	828,00	793,00	793,00	1
7	Demangan	4.718,00	4.044,00	4.224,00	2
8	Terban	3.217,50	2.731,00	2.731,00	1
9	Sentul	3.816,00	2.723,00	2.723,00	1
10	Lempuyangan	2.675,00	2.441,00	2.521,00	2
11	Kotagede	4.578,00	4.158,00	4.158,00	1
12	Gedongkuning	1.633,00	1.224,75	1.224,75	1
13	Giwangan	13.032,00	9.774,00	9.774,00	1
14	Serangan	3.441,00	1.724,00	1.953,00	2
15	Legi	2.190,00	1.716,00	1.716,00	1
16	Ngasem	6.135,00	5.142,00	5.142,00	1
17	Gading	1.140,00	570,00	1.140,00	2
18	Karangkajen	1.87,00	1.875,00	1.875,00	1
19	Prawirotan	2.932,00	2.007,00	2.007,00	1
20	Ciptomulyo	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1
21	Gendeng	220,00	220,00	220,00	1
22	Sangrahan	222,00	222,00	222,00	1
23	Sawo	300,00	165,00	165,00	1
24	Ledokgodomanan	130,00	130,00	130,00	1
25	Semaki	90,00	89,00	89,00	1
26	Senin	877,00	874,00	874,00	1
27	Suryobrantan	236,00	147,00	147,00	1
28	Pujokusuman	352,00	332,00	332,00	1
29	Ngadikusuman	63,00	63,00	63,00	1
30	Pace	90,00	89,00	89,00	1
31	Tunjungsari	1.147,00	528,50	528,50	1
32	Klitikan	6.842,00	4.786,50	6.382,00	2

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota

Dari pengumpulan data tersebut, diperoleh hasil potensi pendapatan retribusi untuk masing-masing pos penerimaan, yaitu kios, los, lapak,

parkir, kamar mandi dan wc, serta bongkar muat adalah sebagai berikut :

Tabel 7.
Potensi Retribusi Pasar di Kota Yogyakarta
Tahun 2012

Pos Penerimaan	Jml Pedagang	Luas M2	Penerimaan Retribusi (Rp)
Kios	591,0	7.666,5	1.048.353.000,00
Los	11.642,0	47.249,0	5.660.922.970,00
Lapak	3.232,0	5.754,5	436.138.500,00
Sub Total	15.465,0	60.670,0	7.145.414.470,00
Parkir			4.808.236.250,00
KM/WC			1.290.092.500,00
Bongkar-muat			128.845.000,00
Listrik			428.013.325,00
Sewa lahan			374.809.415,00
Total			14.175.410.960,00

Sumber: data diolah

Dari komposisi potensi retribusi pasar di Kota Yogyakarta, didapati bahwa penerimaan dari los merupakan penerimaan terbesar yaitu sebesar 5,6 milyar rupiah lebih atau 42,3 persen dari total penerimaan. Disisi lain jumlah seluruh pedagang yang menggunakan los di pasar Kota Yogyakarta adalah 11.642

pedagang. Dari 32 pasar, 26 diantaranya memiliki los yang berpotensi memberikan pendapatan retribusi pada Dinas Pengelolaan Pasar.

4. Proyeksi potensi pendapatan retribusi pasar di Kota Yogyakarta

Tabel 8
Proyeksi Potensi Retribusi Pasar

Tahun	Retribusi (Rp)
2013	14.948.433.057,67
2014	15.217.967.290,89
2015	15.823.160.100,41
2016	16.204.580.525,73
2017	16.735.182.540,51

Sumber : data diolah

Dari hasil proyeksi diketahui bahwa trend pendapatan dari retribusi pasar dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Hal ini dikarenakan masih besarnya potensi yang dimiliki masing-masing pasar yang belum terkelola dengan optimal, misalnya :

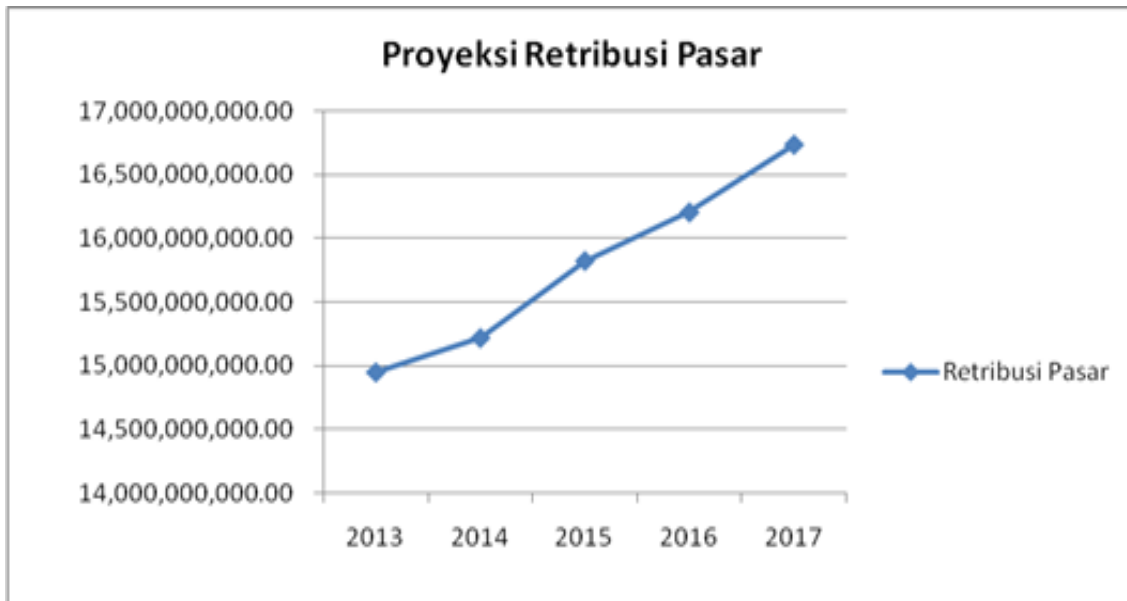
- a. Masih banyaknya lahan pasar yang belum digunakan secara optimal (mangkarak)
- b. Potensi pendapatan lain yang belum digunakan, misalnya pendapatan dari iklan di dinding pasar maupun lantai pasar serta atap pasar.
- c. Belum akuratnya data yang dimiliki untuk masing-masing pasar sehingga potensinya belum terukur secara akurat pula.
- d. Pengelolaan parkir yang belum optimal, misalnya kurang

akuratnya data yang diberikan oleh pengelola parkir sehingga pengelola pasar kesulitan dalam menentukan potensi optimal dari pendapatan parkir di lingkungan pasar.

- e. Pendapatan dari kamar mandi dan wc yang merupakan pengelolaan bagi hasil juga belum optimal karena besarnya biaya pengelolaan dan kurang akuratnya data dari masing-masing pasar.

Namun demikian, trend potensi pendapatan retribusi untuk 32 pasar secara total akan terus mengalami peningkatan secara linear, dan potensi ini akan tereksplorasi secara optimal bila pengelolaan dilakukan secara professional.

Gambar 1
Grafik trend potensi pendapatan retribusi pasar di Kota Yogyakarta



SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Kontribusi atau share retribusi pasar terhadap retribusi daerah selama periode waktu 2007 – 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat sedangkan untuk kontribusi atau share retribusi pasar terhadap PAD secara keseluruhan menunjukkan adanya kecenderungan berfluktuasi dan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka penerimaan retribusinya mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan hampir dua kali lipatnya.
2. Pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi daerah dan retribusi pasar di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun untuk retribusi daerah sebesar 64,59 persen dan retribusi pasar sebesar 77,7 persen
3. Trend pendapatan dari retribusi pasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dikarenakan masih besarnya potensi yang dimiliki masing-masing pasar yang belum dikelola dengan optima.

Berdasarkan pengamatan terhadap penerimaan pendapatan retribusi pasar Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut.

1. Dinas Pengelolaan Pasar dan pihak-pihak terkait harus melakukan pencermatan terus menerus pada pembuatan peraturan dan implementasinya untuk membatasi

gerak ekspansi ritel modern (minimarket/supermarket) agar tidak mematikan pasar tradisional.

2. Lahan-lahan ‘mangkrak’ (kosong) di beberapa pasar perlu dioptimalkan untuk dapat dijual, misalnya dengan menerbitkan penawaran terbuka pada masyarakat umum dengan memasang iklan di surat kabar daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

REFERENSI

- Devas et al, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta.
- Dewanto, Wahyu, 2001, “Peranan Retribusi Pasar Dalam Otonomi Daerah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya”, *Tesis S-2 Program Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta* (tidak dipublikasikan).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Depdagri.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2007-2011.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar.

Santoso, Bagus, 1995, “ Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten Sleman, “ *Prisma* Nomor 4 , LP3ES 19-35.

Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2008, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Depdagri.

Widayat, Wahyu, 1994, “Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE – YKPN*, Yogyakarta, Vol VI, 23 –47.